

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Cv. syakir Media Press.
- Adila, P. R., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungbalai. *Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi*, 1(2), 519–524.
- Adinda, Y., Wulandari, & Saefudin, Y. (2024). Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif *Viktimologi*. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 296–302.
- Admin. (2023). Polrestabes Medan Tangkap Pelaku Rudapaksa Mahasiswi. Metro Online. https://www.metro-online.co/2023/10/polrestabes-medantangkap-pelaku.html?utm_source
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Albani, G. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Main Hakim Sendiri *Eigentrchting* (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 27/Pid.B/20013/Pn.Mtr). *Jurnal Ilmiah Aset*.
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Instrumen Pengumpulan Data. 1–20.
- Alliandus, N. Y. I., Angkasa, A., & Retnaningrum, D. H. (2024). Efektivitas Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan di Wilayah Hukum Polresta Banyumas. *Soedirman Law Review*, 6(1), 31–49. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.1.16036>
- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Lex Renaissance*, 7(1), 69–83.
- Aneta, F. (2025). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Kepada Anak kandungnya Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Sumbang Journal*, 03(03), 16–28.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372.
- Aprilianto, R. F. (2020). Tinjauan Yuridis Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Terkait Batasan Diskresi Kepolisian. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5919/>
- Aprita, S., & Mulkan, H. (2022). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 21–40. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1646>
- Arif, M. (2021). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Hukum*, 13(1), 91–101.

- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Cv. Budi Utama.
- Aryandani, R. (2024). Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>
- Ayuni, M. Z. (2022). Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Selaku Pemakai Dan Pengedar (Studi di Polda Sumatera Selatan).
- Bagenda, C., Quintarti, M. A. L., Ayu, H., Edwin, & Heri Budianto. (2022). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (*Legal Protection for Victims of Sexual Violence*). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), 30. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6099>
- Dadi, A. F. P., Jiwantara, F. A., Putra, I., & Lubis, A. F. (2024). Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara *Discretionary Policy in Government Legal Perspective Of State Administration*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(10), 3807–3811. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6288>
- Danan, K., Dharma, P., Gede, I. D., & Sugama, D. (2024). Kewenangan Diskresi Kepolisian Sebagai Sub-Unsur Struktur Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 9–22.
- Datu Nur Fathahita, Asis, A., & Basri, M. (2023). Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35336>
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261–269.
- Gusty, R. P. P. (2023). Tindakan Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Hak-hak Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(06), 23–27.
- Hafrida, & Usman. (2024). Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana. *Deepublish Publisher*.
- Harruma, I. (2022). Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/01000001/diskresi-dalam-penegakan-hukum-pengertian-contoh-dan-masalahnya>
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49
- Hasibuan, N. H., Fauzi, M. I., Cahya, M., Perangin-angin, R. B. B., & Ibrahim, M.

- (2023). Analisis Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pidana Pemerkosaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban. *Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 1(6), 739–743.
- Hendra, D. (2020). Diskresi Kepolisian Diluar Pengadilan dalam Rangka Penyelesaian Perkara Pencurian oleh Anak dalam Keluarga. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 134–153.
- Herbari, M. I. (2019). Kebijakan Kepolisian Dalam Penerapan Diskresi Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung).
- Hidayanti, C. L., Solikatun, & Wijayanti, I. (2024). Analisis Kesehatan Fisik Dan Psikis Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kasus Di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok Tengah). 2(2).
- Ibnu, S. (2022). Metodologi Penelitian. Widina Bhakti Persada Bandung, 12–26.
- Jainah, Z. O., & Seftiniara, I. N. (2019). Viktimologi. *Sustainability (Switzerland)*. PT.RajaGrafindo Persada.
- Juliana, M., Kusumah, H. A., Eriska, R., & Putri, G. D. (2024). Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di Wilayah Kabupaten Sukabumi. 'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum, 2(1), 8–20. <https://ojs.um-palembang.ac.id/index.php/asabiyah/article/view/83>
- Kumara, A. R. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Universitas Ahmad Dahlan.
- Kurniawan, R. (2019). Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal. *Journal of Swara Justisia*, 2(3), 91–102.
- Kustiwinarsih, Pangaribuan, P., & Roziqin. (2019). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan. *Jurnal Projudice*, 1(1), 83–99.
- Kusuma, F. A., Savana, E. A., Devi, S., & Agustine, Y. F. (2025). Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 77–88. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4927>
- Lathifah, M., Manullang, J. M., Bungana, R., & Ibrahim, M. (2023). Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak: Implikasi Hukum Pidana dan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4).
- Latunussa, S. B., Tamher, S., & Baluntu, R. (2021). Analisis Kewenangan Diskresional Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penindakan Penyidikan Pidana Khusus. *STIH Umel Mandiri Jayapura*, 2(1), 60–78.
- Manik, D. S., & Husna, L. (2023). Efektivitas Diskresi Kepolisin Melalui

- Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Bareleng). *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4), 1–8. <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i4.7687>
- Margaret, M. (2020). *Community Policing* sebagai Bentuk Pengendalian Sosial. *Deviance : Jurnal Kriminologi*, 4(2), 152–164.
- Maria Clara Elfrisma Manalu, Paiman Nadeak, Ray Dinho Simatupang, Parlaungan Gabriel Siahaan, & Dewi Pika Lumban Batu. (2023). Peran Aparat Kepolisian dalam Mengatasi Pencurian Sepeda Motor: Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 20(2), 375–387. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1184>
- Masriah, Triadhari, I., & Rahmawati, F. (2024). Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(2).
- Medika. (2021). Penerapan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung).
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram Universitas Press.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). *Yogyakarta Press*
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). *Umsida Press*.
- Nikhio, A., Sekarwati Amalia, C., & Irawan, Z. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 414–423.
- Ningsih, P. W., Sembiring, G. P., Perangin-angin, R. B. B., & Ibrahim, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(4), 351–360.
- Noorhaliza, A. K., Afrizal, R. D., Permadi, S. C., & Azzahra, T. S. (2023). Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Pertimbangan Moral Dan Hukum. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara>.
- Nova, E., & Elda, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat). *Journal of Swara Justisia*, 1308–1320.
- Nurhaqi, A. (2020). Diskresi Polisi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana.

- Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : *Perspektif Legal System* Lawrence M. Freidman. *Jurnal El- Dusturie*, 1(1).
- Pakpahan, L. C., Panggabean, N., Perangin-angin, R. B. B., & Ibrahim, M. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Problematika Penanganan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(1), 34–42.
- Panjaitan, A., Amanda, E., Purba, H. I., Sinaga, P. A., Sari, R. A. N., Sinaga, S. D., Umayra, ., Purba, Y. L., Sihite, Y. D., & Ramadhan, T. (2024). Dekadensi Moral di Lingkungan Akademik : Menyikapi Berbagai Kasus Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi. *Journal of Citizen Research and Development*.1(2), 773–784.
- Pramono, B. (2020). Diskresi Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Hukum Militer Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 69–80. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3014>
- Prasetyo, D. (2014). Diskresi Kepolisian pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme. Universitas Brawijaya Press.
- Puspita, D., Saragih, R., Rahmawati, S., Parapat, T. A. H., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Tindakan Kekerasan Dalam Sistem Hukum di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2023.Pn Medan. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(2), 153–163.
- Putri, W. (2022). Apakah *Restorative Justice* Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia ? *Jurnal Gema Keadilan*, 9(2).
- Rachman, F. S., & Zahira, P. J. (2024). Tinjauan Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Pada Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(12), 25–35.
- Rais, M. T. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 15(2), 1–20. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>
- Ramadhan, T., & Lbn Batu, D. P. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Pidana Anak. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.7057>
- Redaksi. (2023). Polrestabes Medan Tahan Guru Olahraga yang Cabuli Belasan Siswa. *TribrataTV*. https://tribrata.tv/12/07/hukum/79934/?utm_source
- Redaksi. (2023). Tangani Perkara Deasy Sinulingga | Polrestabes Medan Upayakan Langkah *Restorative Justice*. *ArahIndonesia.Com*. https://arahindonesia.com/2023/07/tangani-perkara-deasy-sinulingga-polrestabes-medan-upayakan-langkah-restorative-justice/?utm_source=chatgpt.com

- Redaksi. (2024). Dinilai Lamban Tangani Kasus Pemerkosaan, Keluarga Demo PolrestabesMedan.SumutPos.
https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/2375428719/dinilai-lamban-tangani-kasus-pemerkosaan-keluarga-demo-polrestabes-medan?utm_source
- Roberts, K. (2019). Penggunaan Diskresi dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Pagarayuang Law Journal*, 2(2), 274–286.
- Salma. (2022). Definisi Operasional: Ciri, Contoh, Cara Menyusunnya. Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/definisi-operasional/>
- Sembiring, R. K. M., & Halimah. (2023). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 17. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.416>
- Sembiring, R. R. (2019). Diskresi Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Terhadap Tindak Pidana.
- Shalsabhila, N. T. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo). *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, 3(2), 109–124.
- Sihotang, A. P., Barus, D. A. H., Hasugian, P. M., Perangin-angin, R. B. B., & Ibrahim, M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Pendidik Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Journal of Law and Nation*, 2(4), 422–431. <http://joln.org/index.php/joln/article/view/74%0Ahttps://joln.org/index.php/joln/article/download/74/89>
- Silaban, M. B. S., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(2), 71–77. <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i2.1912>
- Simamora, D. F., & Wahyudi, A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 605–611.
- Simamora, R. M. (2020). Analisis Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Padang). *Journal of Swara Justisia*, 3(2), 91–102.
- Sinambela, S. M., Sinaga, M. L., Perangin-angin, R. B. B., & Ibrahim, M. (2024). Pemberian Perlindungan dan Pemberlakuan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 28–37.
- Siregar, H. L., Dongoran, P. M., Rumaisha, & Hayani, S. (2024). Analisis Peranan Pendidikan Agama Islam Terhadap Pencegahan Pelecehan Seksual Di

- Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(6), 333–346.
- Situmorang, A., & Muhtaj, M. EL. (2024). Penerapan Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Di Sdn 060856 Kecamatan Medan Perjuangan. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 4(4), 1–23.
- Tantowi, M. I. (2020). Diskresi Polisi Republik Indonesia Dalam Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Tulungagung). *Uniska Law Review*, 1(2), 87–103.
- Warneri, M. R., Paulina, A. L., & Maharani, M. (2023). Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tim Badan Diklat Kejaksaan RI.
- Widoyo, H. (2024). Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Binus University*. <https://binus.ac.id/character-building/2024/09/peran-kepolisian-dalam-meningkatkan-kualitas-penegakan-hukum-di-indonesia/>
- Yuniati, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6), 2419–2429.
- Yustika, A. (2023). Diskursus Pemolisian Berbasis Ham Sebagai *Alternative Access To Justice* Dalam Hukum Yang Bias Gender. *Jurnal Crepido*, 5(2), 133–145. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.133-145>
- Zamili, J. (2022). Kajian Hukum Atas Penerapan Diskresi Kepolisian Ter- (Studi Di Polrestabes Medan) Skripsi Oleh : Bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area Fakultas Hukum.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.